



MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

ANNA TRININGSIH

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERADILAN KONSTITUSI



MAHKAMAH
KONSTITUSI



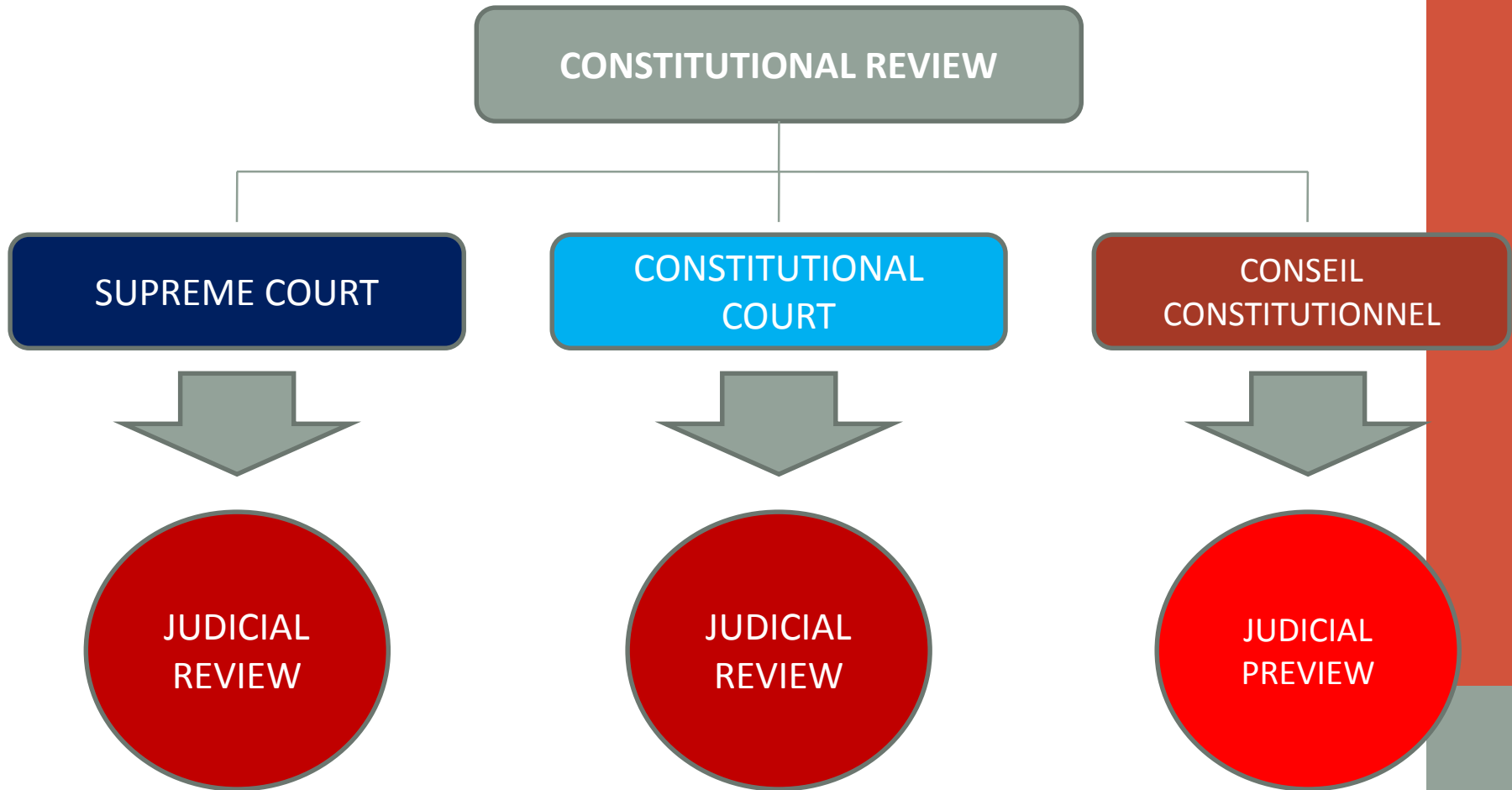
*VERFASSUNGSGERICHT
SHOFT*



*CONSTITUTIONAL
COURT*



CONSTITUTIONAL REVIEW MODELS



SEJARAH JUDICIAL REVIEW



Judicial review diawali dari kasus *Marbury vs. Madison* (1803) di Amerika Serikat. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat (USA) yang dipimpin John Marshall melakukan pengujian (*review* atau *toetsting*) atas konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan oleh Konggres.

SEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI

Verfassungsgerichtshof (Constitutional Court)

Seorang pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen, menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak.





CONSEIL CONSTITUTIONNEL

- Dalam Konstitusi Perancis 1958 disebutkan *Conseil Constitutionnel*, melengkapi lembaga peradilan tertinggi di bidang hukum administrasi. Lembaga ini sering dikaitkan dengan ‘mahkamah konstitusi’ Perancis, meskipun sebutannya adalah ‘dewan’ (*conseil*), bukan ‘mahkamah’ (*court*). Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas.
- Pengujian konstitusionalitas dimaksudkan terbatas hanya untuk pengujian bersifat preventif (*a priori review*) ataupun pengujian yang bersifat konsultatif.

GAGASAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA



Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengusulkan Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “*membanding*” undang-undang. Namun usulan Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo dengan alasan, antara lain, bahwa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.

PERUBAHAN UUD 1945 DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

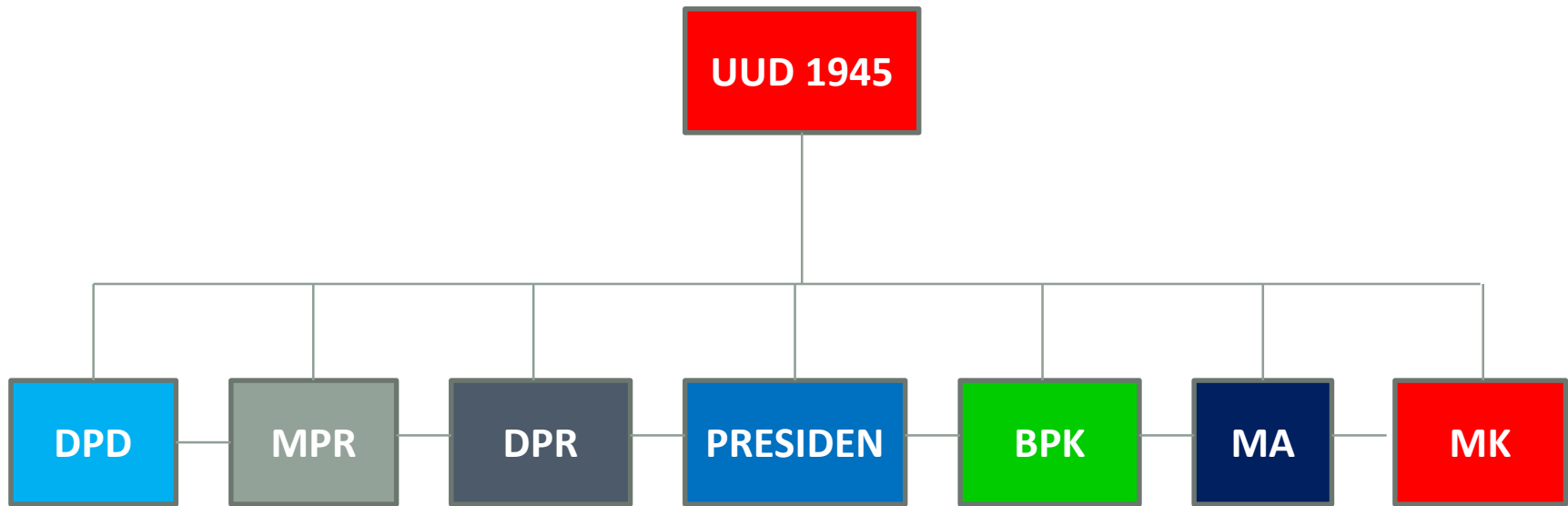
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- ❑ NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM
- ❑ NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS
(Psl. 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945)

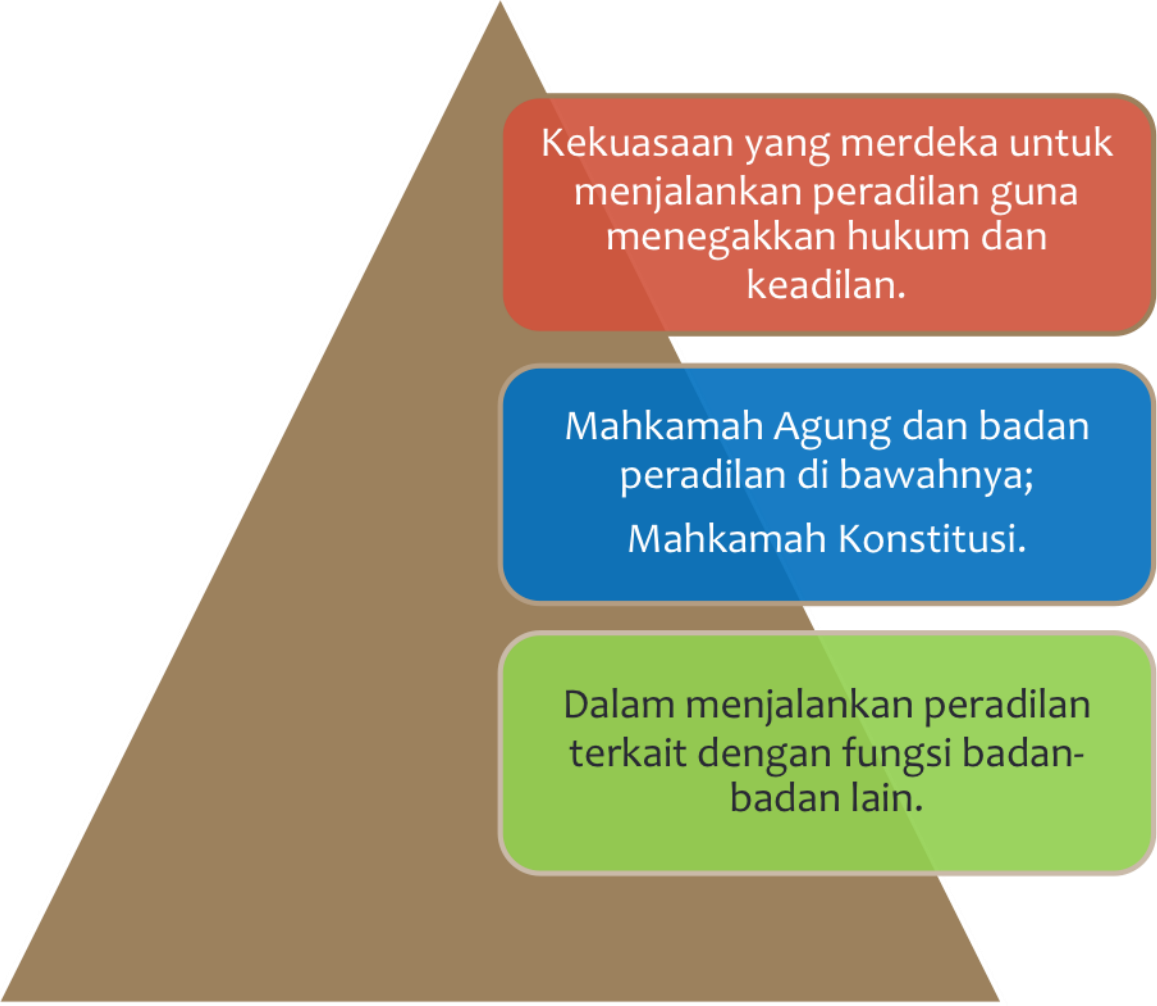
IMPLIKASI DAN PERBANDINGAN



LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA



KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI



Kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan peradilan terkait dengan fungsi badan-badan lain.

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

LEMBAGA TINGGI NEGARA

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

PENGADILAN KONSTITUSIONAL

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI



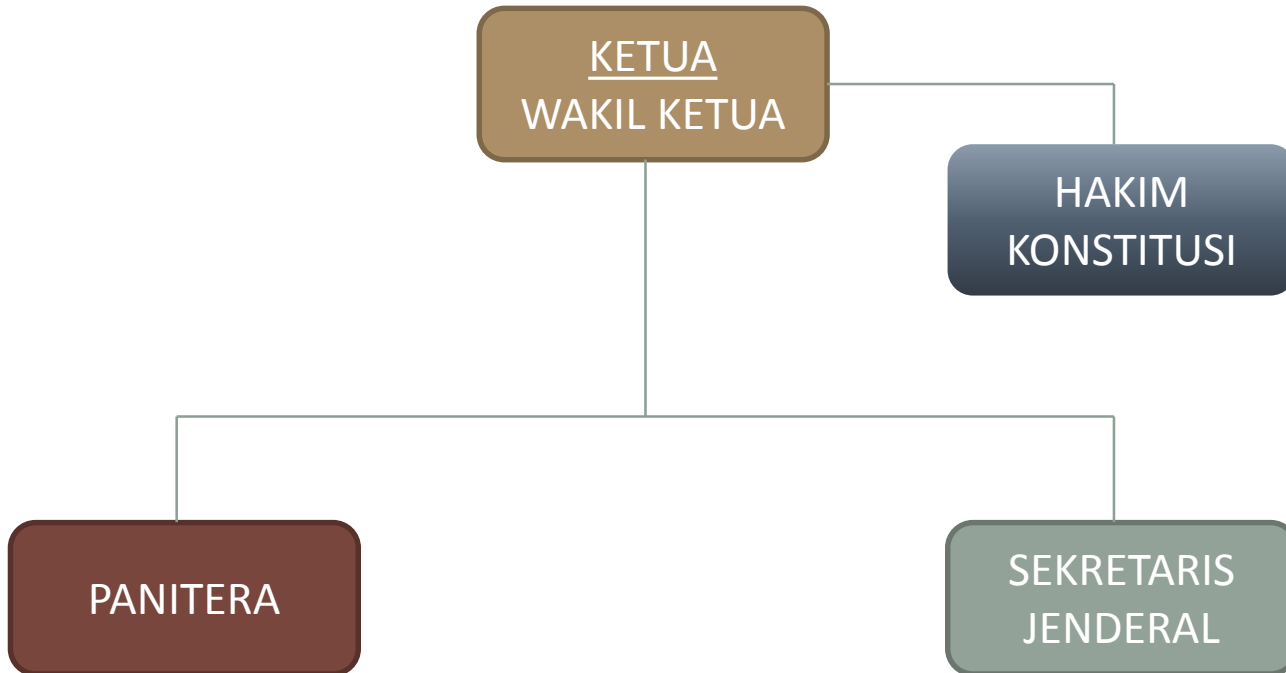
KEWENANGAN

- Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
- Memutus pembubaran partai politik,
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

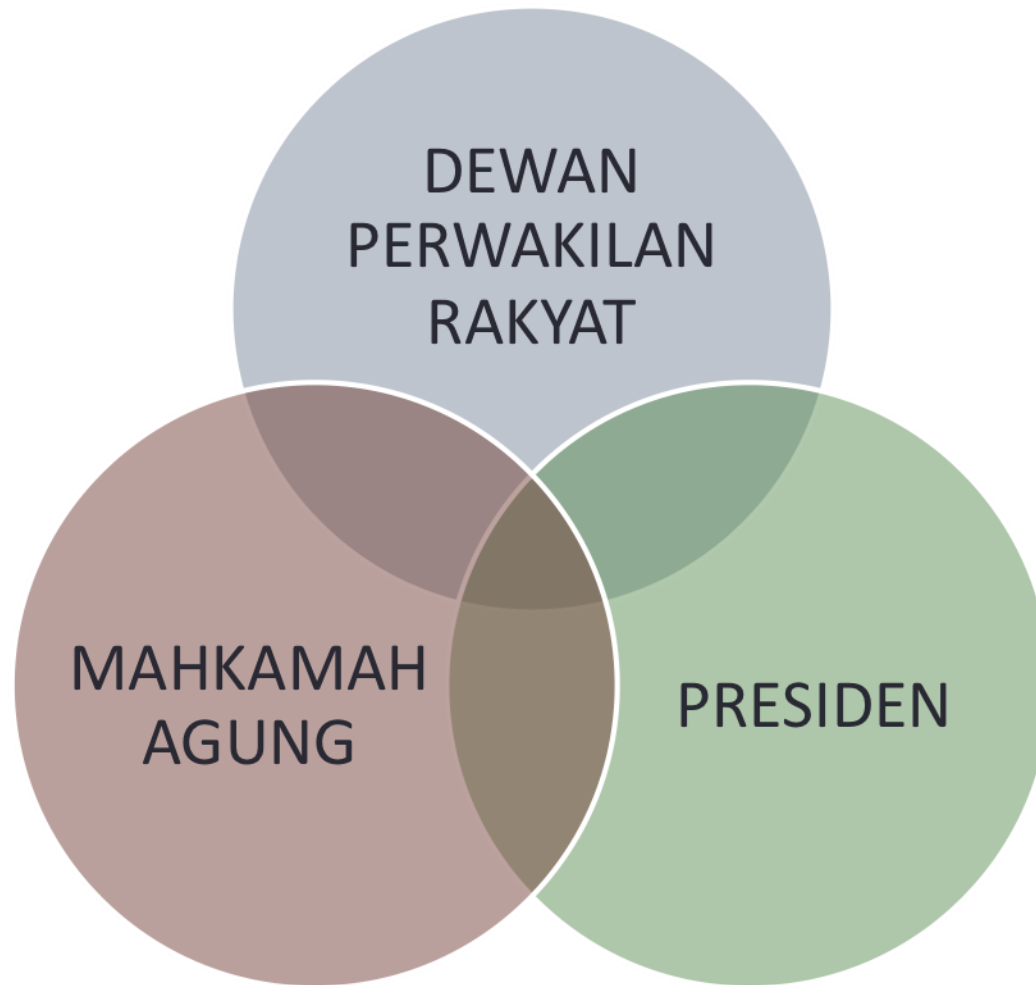
KEWAJIBAN

- Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945

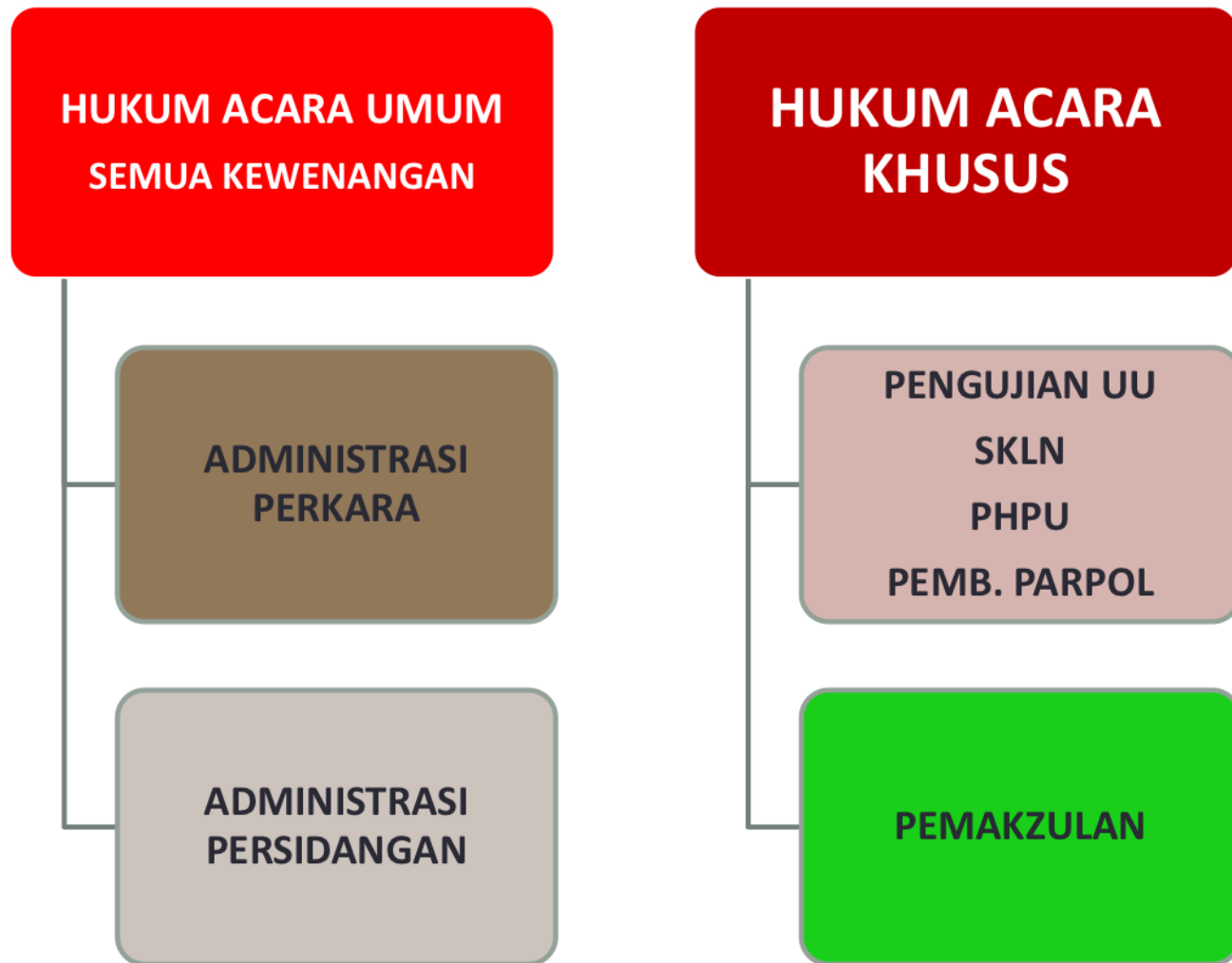
STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI



HAKIM KONSTITUSI



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



HUKUM ACARA MK TERDIRI ATAS 12 BAGIAN

- **BAGIAN PERTAMA** : **UMUM** Pasal 28 ayat (1) s/d (6)
- **BAGIAN KEDUA** : **PENGAJUAN PERMOHONAN** Pasal 29 ayat (1) S/D (2), **PASAL 30**, **Pasal 31 ayat (1) s/d (2)**.
- **BAGIAN KETIGA** : **PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENJADWALAN SIDANG** Pasal 32 s/d 35A
- **BAGIAN KEEMPAT** : **ALAT BUKTI** Pasal 36 s/d 38.
- **BAGIAN KELIMA** : **PEMERIKSAAN PENDAHULUAN** Pasal 39 ayat (1) dan (2)
- **BAGIAN KEENAM** : **PEMERIKSAAN PERSIDANGAN** Pasal 40 s/d 44
- **BAGIAN KETUJUHH** : **PUTUSAN** Pasal 45 s/d 49
- **BAGIAN KEDELAPAN** : **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945** Pasal 50 s/d 60
- **BAGIAN KESEMBILAN** : **SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG.** Pasal 61 s/d 67.
- **BAGIAN KESEPULUH** : **PEMBUBARAN PARTAI POLITIK** Pasal 68 s/d 73
- **BAGIAN KESEBELAS** : **PERSELISIHAN HASIL PEMILU** Pasal 74 s/d 79
- **BAGIAN KEDUABELAS** : **PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN** Pasal 80 s/d 85.



LEGAL STANDING PEMOHON

PUU

- PERSEORANGAN WNI
- MASYARAKAT HUKUM ADAT
- BADAN HUKUM PUBLIK/PRIVAT
- LEMBAGA NEGARA

SKLN

- LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945

PEM. PARPOL

- PEMERINTAH

PHPU

- CALON ANGGOTA DPD
- CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
- PARPOL PESERTA PEMILU

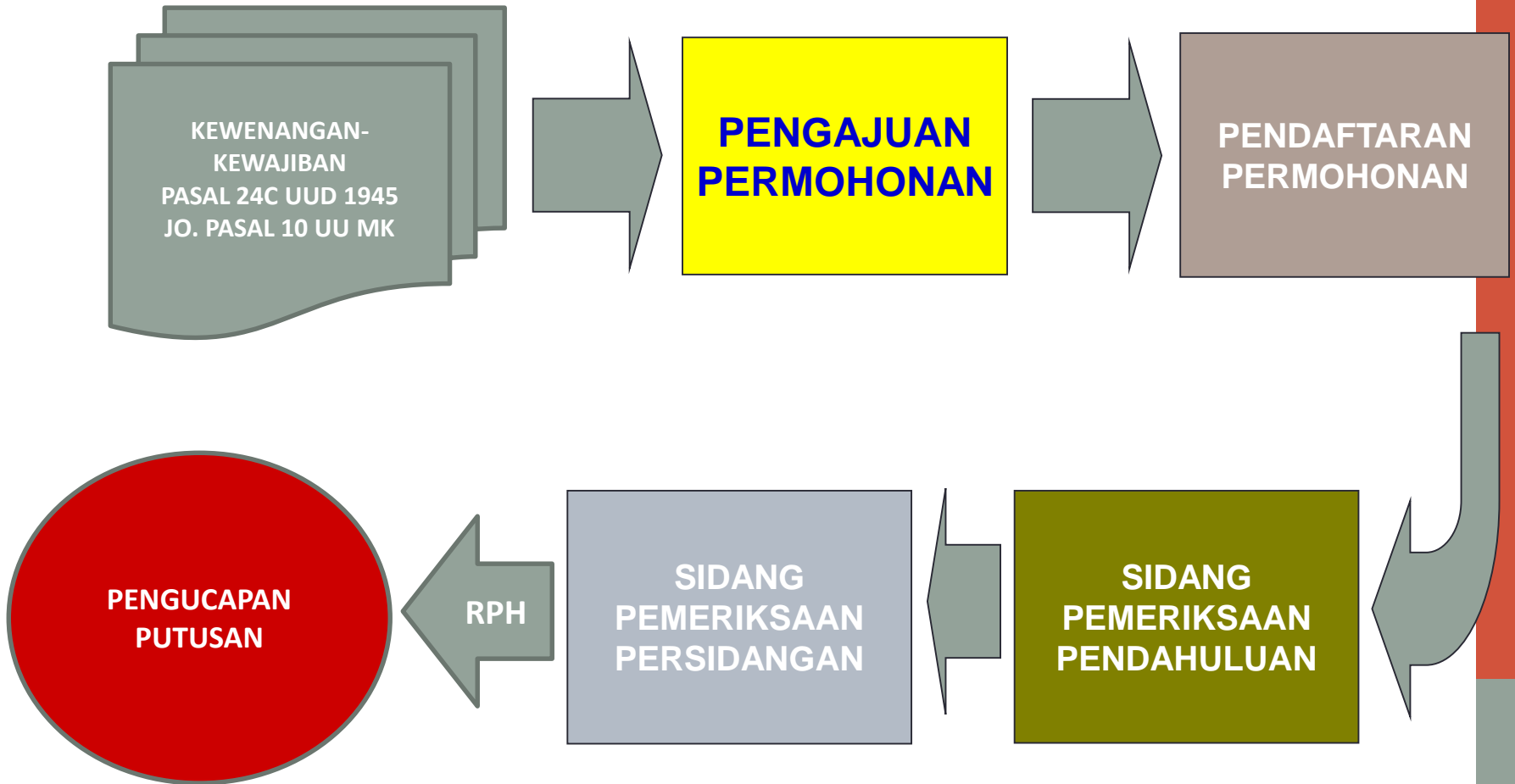
PEMAKZULAN

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

SISTEMATIKA PERMOHONAN



PROSES BERPERKARA



Prosedur Beracara di MK (langsung)



Pemohon datang menghadap Pranata Peradilan Registrasi Perkara untuk mendaftarkan permohonan



Pemohon telah selesai melakukan pendaftaran permohonan



1. Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan, selanjutnya Pemohon menyerahkan berkas permohonan sebanyak 12 rangkap

1.

2.



3. Pranata Peradilan Perkara memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU nomor 8 tahun 2011, yang hasilnya dituangkan dalam formulir ceklis dan membuat lembar disposisi selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda

3.



4. Berkas diproses oleh internal Mahkamah Konstitusi

4.



5. Pranata Peradilan Perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian mencatat dalam BRPK dan membuat tanda terima permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon

5.

6.

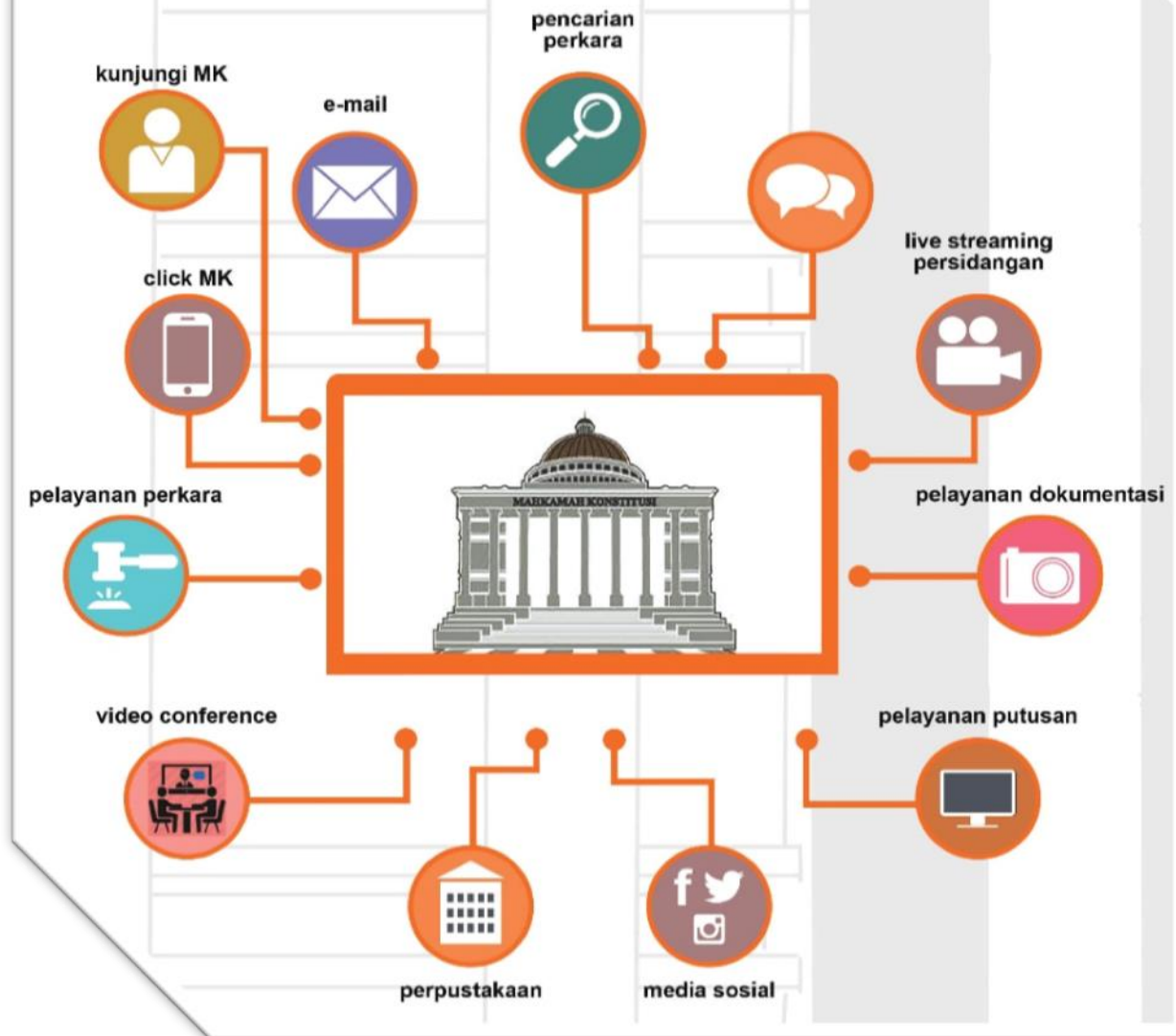
PENDAFTARAN PERMOHONAN LANGSUNG

Prosedur Beracara di MK (online)



E-COURT

Peradilan Modern, Cepat dan Tanpa Biaya





DEWAN
ETIK

UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI



WORKSHOPS
TUNAS INTEGRITAS



KOMITE
INTEGRITAS

ZONA
INTEGRITAS



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**




Pahami Hak Konstitusional Anda



 **Mahkamah Konstitusi**
(Facebook)

 **@Humas_MKRI**
(Twitter)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

 **Majalah Konstitusi**
(Google Play Book)





Click MK, sebuah layanan yang tersedia di smartphone berbasis android dan ios phone yang dapat diakses gratis di play store ataupun app store. Click MK dibangun untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses Mahkamah Konstitusi dari genggaman pemilik smartphone. Adapun Click MK berisi:

- a. penyajian informasi perkara mulai dari jadwal sidang, putusan, risalah yang dapat di download
- b. Streaming Persidangan MK dan Kuliah Umum MK
- c. Persidangan Jarak Jauh dan atau diskusi jarak jauh berbasis video

PORTAL E-JOURNAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Welcome to the portal e-journal of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

JURNAL KONSTITUSI



- **ISSN: 1829-7706** (print)
- **ISSN: -** (online)
- **Accreditation Number (LIPI): 613/Akred/P2MI-LIPI/03/2015**
- **Accreditation Number (DIKTI): 040/P/2014**

Jurnal Konstitusi memuat naskah di bidang hukum dan konstitusi, serta isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi adalah media dwi-bulanan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember)

Abstracted/Indexed in:

-

ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id

[VIEW JOURNAL](#) | [CURRENT ISSUE](#) | [REGISTER](#)

CONSTITUTIONAL REVIEW



- **ISSN: 2460-0016** (print)
- **ISSN: -** (online)

Constitutional Review is a law journal published by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia twice a year. The primary purpose of this journal is to disseminate research, conceptual analysis and other writings of scientific nature on constitutional issues. Articles published cover various topics on constitutions, constitutional courts, constitutional court decisions and issues on constitutional law either in Indonesia or other countries all over the world. This journal is designed to be an international law journal and intended as a forum for legal scholarship which discusses ideas and insights from law professors, legal scholars, judges and practitioners.

Abstracted/Indexed in:

-

[VIEW JOURNAL](#) | [CURRENT ISSUE](#) | [REGISTER](#)

USER

Username

Password

Remember me

[Login](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

[Search](#)

FONT SIZE

[A+](#) [A](#) [A-](#)

Syarat Calon Hakim Agung
Jalur Karier

Lomba Debat Konstitusi
Perguruan Tinggi Se-Indonesia

KONSTITUSI



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung | 23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang | 34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura |
| 2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | 13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | 24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak | 35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka |
| 3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan | 14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya | 36 Universitas Batam Batam |
| 4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang | 15 Universitas Sebelas Maret Surakarta | 26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda | 37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo |
| 5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi | 16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali |
| 6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru | 17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | 28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | 39 Universitas Negeri Papua Manokwari |
| 7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang | 18 Universitas Brawijaya Malang | 29 Universitas Tadulako Palu | 40 Universitas Musamus Merauke |
| 8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu | 19 Universitas Jember Jember | 30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari | 41 Universitas Borneo Tarakan |
| 9 Universitas Lampung Bandar Lampung | 20 Universitas Trunojoyo Bangkalan | 31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado | 42 Universitas Pancasila Tegal |
| 10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang | 21 Universitas Udayana Denpasar | 32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon | |
| 11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok | 22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram | 33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate | |



Informasi Penggunaan Video Conference dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

THANK YOU

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
JUSPAXAR

Matur Suwun
Mator Salangkong
BOLZIN
MERCI

Hatur Nuhun
Mator Kaso'on
Terima Kasih
Syukron
Jaziila

DANKSCHEEN
BIYAN
SHUKRIA
TINGKI

TASHAKKUR ATU
YAQHANYELAY
SUKSAMA
EKHMET
GRAZIE
MEHRBANI
PALDIES

KOMAPSUMNIDA
MAAKE
LAH
MINMONCHAR

SPASSIBO
SNACHALHUYA
NUHUN
CHALTU
WABEEJA
MAITEKA
HUI
YUSPAGARATAM
ATTO
ANHA
MAKETAJ
SPASIBO
DENKAUJA
UNALCHEESH
HAHUR
GUI
EROUJU
SIKOMO
FAKAUJE
FAKAUJE
BAIRKA
TAVTAPUCH
MEDAWAGSE
BAIRKA
MAKETAJ
MINMONCHAR